

BAB II

DINAMIKA KONFLIK DAN PELANGGARAN HAM PADA KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA

Konflik yang terjadi pada Rusia dan Ukraina yang memuncak pada tahun 2022 merupakan salah satu krisis geopolitik paling kompleks dan berdampak luas di abad ke-21. Ketegangan ini tidak hanya melibatkan klaim teritorial dan kepentingan politik, tetapi juga melahirkan eskalasi kekerasan yang berujung pada pelanggaran berat kepada nilai-nilai dari hukum internasional serta hak asasi manusia. Bab ini bertujuan untuk menguraikan dinamika konflik yang melatarbelakangi invasi militer Rusia ke Ukraina, termasuk faktor-faktor historis, politik, dan strategis yang memperumit hubungan kedua negara. Selain itu, pembahasan akan difokuskan pada bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi selama konflik dengan penekanan khusus pada tindakan terhadap tawanan perang sebagai salah satu manifestasi pelanggaran hukum humaniter internasional.

2.1 Dinamika Konflik Rusia dan Ukraina

Jauh sebelum hubungan antara Rusia dan Ukraina memanas, ada berbagai macam rentetan sejarah panjang yang menjadi awal dari permasalahan ini, yakni runtuhnya Uni Soviet, dimana banyak sekali negara-negara yang pada periode sebelumnya berada dibawah kepemimpinan Uni Soviet pada akhirnya mendeklarasikan bahwa negaranya berdiri sendiri dan berada di luar dari kepemimpinan Uni Soviet. Adanya perbedaan pandangan dan keinginan dari Rusia dan Ukraina juga

menjadikan hubungan antara keduanya menjadi rumit dan memanas, dimana Rusia berkeinginan untuk menyatukan negara-negara yang menjadi pecahan dari Uni Soviet. Sedangkan Ukraina sendiri memiliki keinginan untuk bergabung dengan negara barat utamanya bergabung dengan NATO. Berawal dari perbedaan keinginan dan pandangan inilah lalu muncul banyak krisis serta konflik yang menunjang keruhnya hubungan antara kedua negara.

2.1.1 Krisis Krimea

Krisis Krimea atau yang juga dapat disebut dengan Aneksasi Krimea oleh Rusia bermula pada bulan Maret 2014 yang mana hal ini terjadi setelah revolusi Ukraina pada tahun 2014. Hal ini juga menjadi bagian dari kerusuhan pro-Rusia dan anti-pemerintahan yang meluas di wilayah Ukraina bagian tenggara. Adapun kepentingan lain yang dimiliki Rusia di Krimea adalah adanya pelabuhan Sevastopol yang dijadikan sebagai basis militer Rusia di wilayah perairan Laut Hitam serta menjadikan pelabuhan tersebut sebagai titik tumpu dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan Rusia.³³ Di sisi lain, adanya jalur pipa gas Rusia dan warga dengan etnis dan keturunan darah Rusia di Krimea menjadikan kepentingan tersendiri bagi Rusia untuk melakukan misi penyelamatan warganya dari krisis politik yang terjadi di Ukraina. Terlebih keinginan dari masyarakat Krimea yang

³³ RAHMAN, R. H. (2016). *ANEKSASI CRIMEA OLEH RUSIA*. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/77804>

menginginkan Krimea untuk menyatakan kemerdekaan atas Ukraina dan mendeklarasikan kebergabungannya dibawah bendera Rusia.

Beberapa wujud kegiatan yang dilakukan Rusia untuk mendukung aneksasinya adalah dengan melakukan intervensi militer serta mencampuri urusan politik. Intervensi yang dilakukan Rusia meliputi pengerahan pasukan militer untuk menguasai wilayah darat dan wilayah perbatasan Krimea. Secara politik Rusia menempatkan beberapa politisinya di Krimea dan melakukan legitimasi dengan melakukan sejumlah referendum untuk memperebutkan wilayah Krimea dari Ukraina.³⁴ Kemudian, Vladimir Putin menandatangani dan mengesahkan undang-undang Aneksasi yang telah di sepakati oleh perdana menteri dan parlemen Krimea, yang mana undang-undang tersebut berisikan persetujuan secara resmi bahwa Krimea bergabung dan menjadi wilayah baru dibawah kepemimpinan federasi Rusia.

2.1.2 Perang di Donbas dan Dukungan Rusia pada Kelompok Separatis

Pasca Revolusi Maidan di Ukraina pada tahun 2014, muncullah aksi demo dari kelompok anti-revolusi dan pro-Rusia di Donetsk dan Luhansk, atau dapat disebut sebagai “Donbas”. Gerakan ini bermula ketika Rusia melakukan invasi dan aneksasi Krimea. Kelompok separatis ini didukung oleh Rusia untuk merebut gedung-gedung pemerintahan Ukraina dan mendeklarasikan wilayah Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah merdeka

³⁴ Widiassa, R. (2018). Bingkai Identitas dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia di Ukraina. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(1), 60. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n1.5>

dan menyebabkan konflik berkepanjangan dengan pemerintah Ukraina. Rusia secara rahasia memberikan dukungan kepada kelompok separatis ini dengan sejumlah pasukan dan persenjataan.³⁵ Dimana Rusia mengirimkan spesialis militer yang nantinya di claim sebagai veteran perang sehingga tidak memunculkan kecurigaan dari pemerintah Ukraina atas ikut campurnya Rusia dalam kelompok separatis.

Pada akhir agustus 2014, Ukraina berhasil mengembalikan banyak area yang telah diambil alih oleh para kelompok separatis dan hampir berhasil untuk mengambil lagi wilayah perbatasan Ukraina dan Rusia. Atas kemenangan Ukraina ini, pihak Rusia kembali mengirimkan bantuan secara besar-besaran yang meliputi pasukan militer, artileri, hingga tank yang mengakibatkan konflik ini makin berkepanjangan dan sulit menemui titik terang.

2.1.3 Perjanjian Minsk

Perjanjian Minsk terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada 5 September 2014 dan pada 12 Februari 2015. Perjanjian ini dilakukan dan dinegoisasikan dibawah naungan Perancis, Jerman, dan OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe).³⁶ Namun kedua perjanjian ini memiliki isi dan kesepakatan yang kurang lebih sama dikarenakan perjanjian Minsk 2 bertujuan untuk memperkuat komitmen

³⁵ *Konflik di Donbas, Ukraina: Penjelasan Visual* | Crisis Group. (n.d.). Retrieved November 21, 2024, from <https://www.crisisgroup.org/content/conflict-ukraines-donbas-visual-explainer>

³⁶ *Perjanjian Minsk-1* | Chatham House – Lembaga Pemikir Urusan Internasional. (n.d.). Retrieved November 21, 2024, from <https://www.chathamhouse.org/2020/05/minsk-conundrum-western-policy-and-russias-war-eastern-ukraine-0/minsk-1-agreement>

terhadap perdamaian. Dalam perjanjian Minsk terdapat beberapa bidang perjanjian yang meliputi :

1. Bidang keamanan, yang meliputi pembentukan atau kesepakatan gencatan senjata yang dipantau oleh OSCE secara langsung, penarikan pasukan dan persenjataan militer berat di kedua sisi garis kontak konflik, pelucutan senjata kelompok separatis, dan penarikan pejuang asing.
2. Bidang Kemanusiaan, yang meliputi pertukaran tahanan perang dan ketentuan mengenai akses kemanusiaan serta pembersihan ranjau yang mengancam keamanan warga sipil sebagai inti pembahasan pada bidang kemanusiaan
3. Bidang Ekonomi, meliputi pembentukan rencana pembangunan ekonomi untuk Donbas saat perjanjian di tandatangani dan beberapa bulan setelah perang, adanya kemauan antar kedua belah pihak untuk memulai kembali hubungan ekonomi lintas garis kontak.
4. Bidang Isu-isu Politik, yang difokuskan pada status wilayah Donetsk dan Luhansk dengan maksud untuk Ukraina melakukan reformasi konstitusional untuk mendesentralisasi undang-undang tentang pemerintahan sendiri bagi kedua wilayah ini.

Perjanjian Minsk kedua memiliki 2 kelebihan yakni, perjanjian tersebut menetapkan komitmen resmi Rusia untuk mengembalikan wilayah

Donetsk dan Luhansk ke dalam kendali Ukraina.³⁷ Yang secara teori dimaksudkan untuk mewujudkan reintegrasi penuh kedua wilayah ke Ukraina. Kedua, setelah penandatangananannya, tingkat kekerasan dan jumlah korban perang menurun secara signifikan, meskipun gencatan senjata tidak pernah benar-benar tuntas.

2.1.4 Awal Invasi Rusia

Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina ini merupakan sebuah konflik militer yang terjadi pada 3 Maret 2021. Namun, pada periode 2021 masih belum ada serangan atau kegiatan militer secara langsung yang dilakukan oleh Rusia, melainkan hanya sebatas ancaman dan serangkaian kegiatan pelatihan kemiliteran yang mengindikasikan bahwa akan ada suatu kegiatan militer skala besar yang akan dilakukan oleh Rusia. Pada Juli 2021, Presiden Rusia Vladimir Putin menerbitkan esai dengan judul “Tentang kesatuan Sejarah Bangsa Rusia dan Ukraina” dimana pada esai tersebut, ia menegaskan pandangannya terhadap status Rusia dan Ukraina yang merupakan satu bangsa. Dan Rusia juga menyatakan bahwa akan adanya inisiasi keterikatan dan bergabungnya Ukraina ke NATO dan penambahan area kekuasaan NATO yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi status keamanan nasional Rusia, dikarenakan letak geografis

³⁷ Allan, D. (2020). *The Minsk-2 agreement* | Chatham House – International Affairs Think Tank. <https://www.chathamhouse.org/2020/05/minsk-conundrum-western-policy-and-russias-war-eastern-ukraine-0/minsk-1-agreement>

negara-negara eropa yang tergabung dengan NATO berbatasan langsung dengan sebagian wilayah Rusia dan Ukraina.³⁸

Pada 24 Februari 2022 merupakan awal dari invasi Rusia ke Ukraina. Ini terjadi karena kampanye penumpukan militer serta deklarasi pengakuan Rusia atas Republik Rakyat Donesk dan Republik Rakyat Luhansk yang diproklamirkan secara sepihak pada hari-hari sebelum invasi. Hal ini kemudian diikuti dengan pergerakan angkatan bersenjata Rusia yang perlahan masuk kedalam area Donbas di Ukraina Timur pada 21 Februari 2022. Yang kemudian dilanjutkan dengan pengumuman operasi militer yang memiliki misi “demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina” oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, kemudian disusul dengan serangan rudal di berbagai tempat di Ukraina termasuk ibu kota Kiev. Sehingga Layanan Perbatasan Ukraina mengemukakan bahwa perbatasan Ukraina dengan Belarusia dan Rusia juga terdampak.

2.1.5 Krisis Kemanusiaan dan Krisis Ekonomi

Menurut badan pengungsi PBB, lebih dari tiga belas juta orang atau hampir sepertiga populasi Ukraina sebelum perang telah mengungsi sejak periode awal invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Dari jumlah tersebut, lima juta pengungsi melakukan pengungsian secara internal untuk menghindari wilayah dengan kontak konflik secara langsung, sedangkan lebih dari delapan juta pengungsi tinggal di negara-negara tetangga yang

³⁸ *The history of Russia's aggression in Ukraine: Crimea invasion and Donbas.* (n.d.). Retrieved November 21, 2024, from <https://war.ukraine.ua/the-history-of-russian-aggression-in-ukraine/>

aman dan terhindar dari area konflik. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa hingga Juni 2023, setidaknya 8.938 warga sipil dinyatakan tewas dan 15.442 lainnya terluka. Angka ini merupakan korban yang dikonfirmasi dan memiliki kemungkinan jumlah yang tidak terkonfirmasi jauh lebih besar.³⁹ Para korban kebanyakan adalah masyarakat sipil yang tinggal di wilayah Donetsk dan Luhansk timur atau dapat di sebut sebagai wilayah Donbas, tempat dengan level pertempuran paling tinggi.

Sementara itu, pejabat AS mengatakan pasukan militer Rusia telah memindahkan secara paksa 1,6 juta pengungsi Ukraina ke wilayah Rusia. Pemandahan paksa ini juga memiliki tujuan lain, yakni para pengungsi dipaksa untuk melepas status kewarganegaraan Ukraina sebagai bentuk intimidasi pada Ukraina, bahwa banyak dari rakyatnya yang ingin meninggalkan Ukraina atas pertidaksetujuan terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah negaranya.

Perang yang sedang berkecambuk antara Rusia dengan Ukraina juga menimbulkan krisis ekonomi yang hebat bagi Ukraina. Sepanjang 2022, status ekonomi Ukraina menurun hingga 29,1%. Ditahun sebelumnya yakni pada tahun 2021, ekonomi Ukraina sempat bertumbuh hingga mencapai angka 3,4%. Namun invasi besar-besaran yang diinisiasi oleh Rusia kepada Ukraina pada prnghujung tahun 2021 dan makin memperburuk keadaan status keamanan negara Ukraina di tahun-tahun berikutnya cukup membuat

³⁹ *Perang Rusia-Ukraina: Seberapa Buruk Krisis Kemanusiaan?* (n.d.). Retrieved November 21, 2024, from <https://www.cfr.org/in-brief/ukraine-humanitarian-crisis-refugees-aid>

taraf pertumbuhan ekonomi Ukraina anjlok dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi Ukraina akan turun sebanyak 45,1%.⁴⁰ Hal ini disebabkan dengan berhenti beroprasinya lebih dari setengah perusahaan negara, adapun faktor lain menurunnya taraf pertumbuhan ekonomi Ukraina juga disebabkan oleh sektor ekspor mereka yang terhambat akibat perang.

2.2 Pelanggaran HAM dalam Konflik Rusia dan Ukraina Periode 2021-2023

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak tahun 2021 tidak hanya memunculkan ketegangan geopolitik global, tetapi juga menciptakan krisis kemanusiaan yang serius akibat maraknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Selama periode konflik tersebut, berbagai laporan independen dari lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi non-pemerintah, mengungkap pola kekerasan sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat, baik terhadap kombatan maupun warga sipil. Pelanggaran HAM yang tercatat meliputi kekerasan terhadap tawanan perang, serangan terhadap infrastruktur sipil, penangkapan paksa, penghilangan orang secara tidak sah, deportasi massal, serta berbagai bentuk kekerasan fisik dan psikologis terhadap warga sipil. Kejadian-kejadian ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, tetapi juga memperlihatkan

⁴⁰ *Ekonomi Ukraina Ambruk Akibat Invasi Rusia – DW – 11.04.2022*. (n.d.). Retrieved November 21, 2024, from <https://www.dw.com/id/ekonomi-ukraina-ambruk-akibat-invasi-rusia/a-61428780>

adanya ketidakpatuhan terhadap Konvensi Jenewa serta instrumen-instrumen HAM internasional lainnya. Subbab ini bertujuan untuk menguraikan dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, dimulai dari kekerasan terhadap tawanan perang, serangan terhadap masyarakat sipil dan fasilitas publik, hingga tindakan represif lainnya yang menargetkan warga sipil secara langsung. Melalui pengkajian yang sistematis dan berbasis data, analisis ini akan memperlihatkan eskalasi pelanggaran yang terjadi, aktor yang terlibat, serta dampaknya terhadap kondisi sosial, hukum, dan kemanusiaan di wilayah konflik. Pembahasan ini juga penting sebagai dasar untuk menilai upaya penegakan hukum dan keadilan internasional di tengah konflik yang masih berlangsung.

2.2.1 Kekerasan Militer terhadap Tawanan Perang

Kekerasan militer terhadap tawanan perang yang dilakukan dibawah kekuasaan federasi Rusia merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia serta pelanggaran berat kepada Hukum humaniter Internasional. Dokumentasi yang dilakukan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengungkapkan adanya pelanggaran yang ada terjadi pada saat penangkapan tahanan perang maupun pada periode penahanan. Tercatat ada beberapa pelanggaran yang terjadi dari pihak militer terhadap para tawanan perang baik dari tawanan militer ataupun warga sipil.⁴¹ Pelanggaran yang ada meliputi hukuman mati terhadap 15 tahanan perang

⁴¹ Dewi Tangkas, P., Dwita Apriani, K., & Indra Pramana, G. (2023). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial PELANGGARAN HAM DALAM INVASI PERANG RUSIA DAN UKRAINA*.

dan penggunaan para tahanan sebagai perisai hidup. Selain itu, terdapat pula kasus kematian dua tahanan perang yang diakibatkan oleh penderitaan luka serius yang disebabkan minimnya perawatan medis yang memadai. Disisi lain, terdapat laporan yang menyatakan bahwa adanya penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan pihak Rusia dalam mengorek informasi dari para tahanan. Evakuasi para tahanan juga menjadi sebuah catatan khusus dimana pada prakteknya, para tahanan perang dievakuasi atau dipindahkan dari satu titik ke titik lain menggunakan kendaraan yang diisi melebihi kapasitas yang seharusnya dapat dibawa oleh kendaraan tersebut, ditambah tidak adanya ventilasi yang memadai serta dengan mata tertutup dan tanpa adanya akses air bersih dan toilet.

Di berbagai lokasi berbeda, OHCHR mencatat lima kasus kematian tahanan perang setelah menerima perlakuan buruk dan penyiksaan, serta empat kasus kematian yang diakibatkan oleh buruknya pelayanan medis selama masa penahanan. Melalui wawancara yang dilakukan terhadap 24 tahanan wanita, terdapat 17 kasus dimana tahanan wanita mengalami kekerasan, termasuk pemukulan, elektroksi, dan ancaman kekerasan seksual. Di wilayah Donetsk, OHCHR juga mendokumentasikan sebelas kasus pengadilan sepihak, penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap para tahanan perang dengan tujuan untuk memaksa kesaksian untuk menolak

diadili di pengadilan dan menolak hak untuk mendapatkan penasihat hukum pilihannya sendiri.⁴²

2.2.2 Serangan terhadap Sipil dan Fasilitas Publik

Melalui hasil kerja Misi Pemantauan Hak Asasi Manusia di Ukraina atau yang dikenal sebagai Human Right Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU), OHCHR mempublikasikan detail keadaan dampak perang di Ukraina pada periode 1 Agustus hingga 31 Oktober 2022 yang memberikan dampak kepada warga sipil dan para pejuang perang. Pada data tersebut memaparkan terdapat 3.505 korban sipil, beserta penjabarannya yakni 901 tewas dan 2.604 luka yang diperkirakan akan terus bertambah mengikuti perkembangan konflik yang terjadi.⁴³

Laporan ini juga menyatakan bahwa pasukan militer Rusia melakukan penyerangan dan perusakan terhadap sejumlah fasilitas publik dan objek pemasok energi. Sejumlah fasilitas publik yang terdeteksi mengalami penyerangan adalah beberapa fasilitas pendidikan dan kesehatan dengan jumlah 32 lembaga pendidikan dan 5 lembaga kesehatan yang hancur akibat serangan yang dilakukan oleh pihak militer Rusia. Adanya laporan tambahan dari Pusat Layanan Kesehatan Ukraina (UHC) yakni sebanyak 334 serangan terhadap 267 fasilitas kesehatan milik Ukraina

⁴² *Rincian Pelanggaran HAM Ukraina dan Rusia Menurut Komisi HAM PBB, Termasuk Eksekusi Mati Tawanan.* (n.d.). Retrieved November 21, 2024, from <https://www.kompas.tv/internasional/391190/rincian-pelanggaran-ham-ukraina-dan-rusia-menurut-komisi-ham-pbb-termasuk-eksekusi-mati-tawanan?page=all>

⁴³ Rizqiah, S. N., Rachmadyantira, K., Puan Maharani, A., & Angkasari, W. (2022). *PELANGGARAN HUKUM PADA INVASI RUSIA-UKRAINA DITILAU DARI KONVENSI JENEWA 1949 LEGAL VIOLATIONS IN THE RUSSIA-UKRAINE INVASION UNDER THE GENEVA CONVENTIONS OF 1949.* 4(2), 90–102. <https://doi.org/10.25105/terasrev.v4i2.19963>

dengan penjabaran 230 fasilitas rusak dan 37 lainnya hancur. Fasilitas kesehatan yang menjadi target dari serangan ini adalah rumah sakit, unit gawat darurat, klinik perawatan primer, dan rumah sakit anak. Korban teridentifikasi dari penyerangan ini adalah 97 korban tewas dan 114 lainnya luka-luka.⁴⁴ Terkait penyerangan terhadap fasilitas kesehatan Dampak dari kerusakan fasilitas publik ini adalah lemahnya akses memadai kepada pendidikan anak-anak serta perawatan yang memadai pada wilayah-wilayah yang tidak terlibat konflik secara langsung. Pada objek pemasok energi, tercatat militer Rusia menyerang sejumlah fasilitas energi dan pembangkit listrik yang ada di 10 wilayah di Ukraina hingga menyebabkan minimnya pasokan air bersih dan listrik di seluruh wilayah Ukraina baik yang menjadi lokasi keberlangsungan konflik secara langsung maupun tidak.

2.2.3 Penangkapan Paksa, Penghilangan, dan Deportasi Warga Sipil

Berdasarkan data yang didapatkan oleh HRMMU terdapat 457 kasus penahanan paksa dan laporan kehilangan warga sipil yang meliputi 395 korban laki-laki, 61 korban wanita, serta seorang anak kecil yang dilakukan oleh militer Rusia. Dalam kasus tersebut juga ditemukan bahwa diantara para korban setidaknya ada 20 orang yang meliputi 19 pria dan satu wanita meninggal dunia selama periode penahanan maupun ditemukan tewas saat ada peninjauan oleh pihak HRMMU.⁴⁵

⁴⁴ Barten, D. G., Tin, D., Granholm, F., Rusnak, D., van Osch, F., & Ciottone, G. (2023). Attacks on Ukrainian healthcare facilities during the first year of the full-scale Russian invasion of Ukraine. *Conflict and Health*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s13031-023-00557-2>

⁴⁵ *Ukraine: civilian casualty update 15 May 2023* | OHCHR. (n.d.). Retrieved November 21, 2024, from <https://www.ohchr.org/en/news/2023/05/ukraine-civilian-casualty-update-15-may-2023>

Adapun dokumentasi terkait praktik penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga sipil yang ditahan di fasilitas tahanan pra-peradilan Federasi Rusia. Dalam berbagai kasusnya dilaporkan bahwa banyak warga sipil yang ditangkap kemudian dijebloskan ke dalam penjara yang sama dengan tahanan perang, meskipun dalam hukum kemanusiaan internasional menyebutkan bahwa tahanan perang dan warga sipil wajib ditempatkan dalam sel yang berbeda.⁴⁶ Di wilayah Khiriv, HRMMU menemukan 34 kasus warga sipil yang dijadikan korban penyiksaan dan penahanan paksa oleh militer Rusia. Tujuh orang yang berhasil dibebaskan mengungkapkan bahwa para tahanan menerima penyiksaan serta mendapat tindakan tidak manusiawi selama masa penahanan.

Disisi lain menurut HRMMU pihak Ukraina juga melakukan penahanan sewenang-wenang dan mencatatkan 53 kasus, yang 32 diantaranya oleh pasukan bersenjata Ukraina dihilangkan secara paksa. Dari sejumlah kasus tersebut tidak luput dari tindakan penyiksaan dan perlakuan buruk yang dilakukan oleh Badan layanan Keamanan Ukraina yang tidak dapat dihindari dengan dalih untuk menggali informasi terkait fasilitas tahanan yang dimiliki Rusia.

Terdapat tambahan laporan yang melampirkan data deportasi paksa anak-anak, termasuk anak yang sedang dalam perawatan medis di beberapa daerah seperti Donetsk, Kherson, Kherkiv, Luhansk, dan Zaporizhzhia yang

⁴⁶ *Report on the human rights situation in Ukraine (1 August 2022 – 31 January 2023) - Ukraine | ReliefWeb.* (n.d.). Retrieved November 21, 2024, from <https://reliefweb.int/report/ukraine/report-human-rights-situation-ukraine-1-august-2022-31-january-2023>

dipindahkan atau dideportasi paksa ke wilayah dibawah bayang-bayang Rusia atau bahkan dipindahkan ke Federasi dibawah kepemimpinan Rusia.⁴⁷ HRMMU masih terus berusaha menggali berbagai informasi dan mengemukakan kenyataan lain meliputi pelayanan yang diberikan kepada para tawanan perang dan warga sipil yang ditahan dibawah pemerintahan mereka. Selama fase pemantauan dan penggalian informasi HRMMU mewawancarai sebanyak 33 tawanan perang beserta masyarakat sipil dari pasukan militer Rusia dan kelompok bersenjata yang tergabung di enam pusat tahanan peradilan yang digunakan untuk menahan para tawanan perang. Fakta yang ditemukan adalah banyaknya tindak kekerasan di berbagai macam aspek yang diterima oleh pihak militer yang menjadi tawanan perang maupun pihak warga sipil.

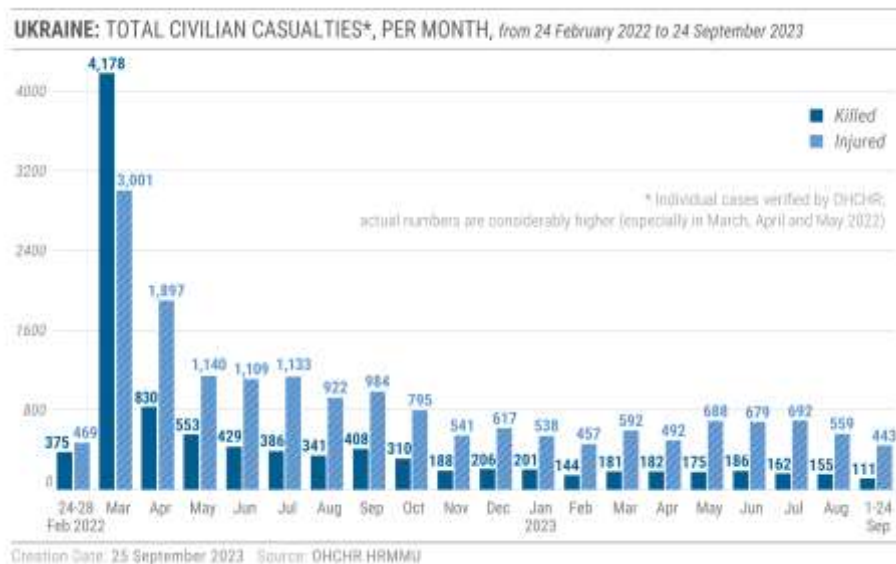
2.2.4 Tindak Kekerasan Terhadap Warga Sipil

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan penderitaan luar biasa bagi warga sipil, yang tidak hanya terdampak secara langsung oleh serangan militer, tetapi juga menjadi korban dari pola kekerasan yang sistematis dan terstruktur. Berdasarkan dokumentasi Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), warga sipil menjadi pihak yang paling menderita dalam konflik ini. Berbagai infografis resmi yang diterbitkan oleh OHCHR dan mitra visualisasi independen memberikan gambaran menyeluruh tentang skala dan intensitas kekerasan

⁴⁷ *Deportation, Treatment of Ukraine's Children by Russian Federation Take Centre Stage by Many Delegates at Security Council Briefing | Meetings Coverage and Press Releases.* (n.d.). Retrieved November 21, 2024, from <https://press.un.org/en/2023/sc15395.doc.htm>

terhadap warga sipil dari berbagai sudut: temporal, geografis, dan jenis senjata yang digunakan. Berikut ini adalah pemaparan dan analisis yang disusun berdasarkan periode waktu serta jenis data dari masing-masing infografis.

Gambar 2.1 Jumlah Korban Sipil per Bulan (24 Februari 2022 – 24 September 2023)

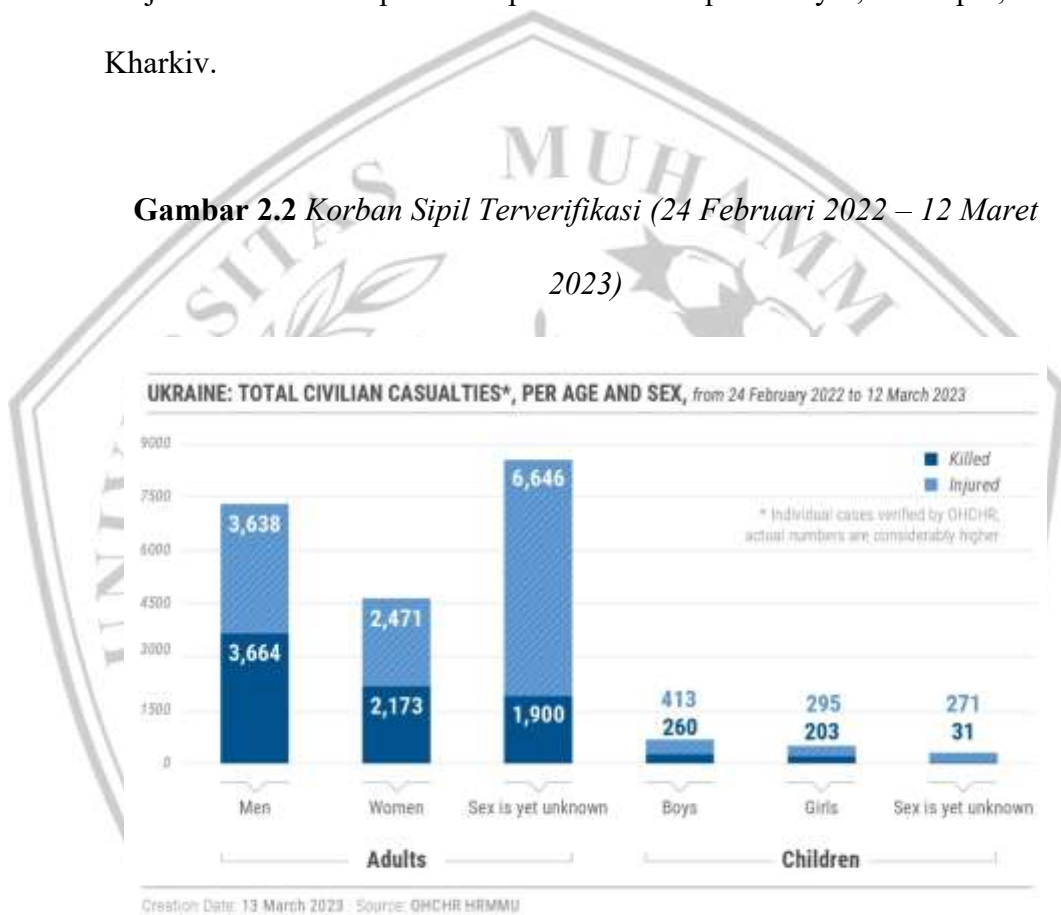


Sumber : OHCHR – *Cumulative Civilian Casualties Chart, September 2023*

Dari data tersebut menampilkan jumlah korban sipil yang dikonfirmasi selama lebih dari satu tahun pertama konflik. Data menunjukkan bahwa puncak korban terjadi pada Maret 2022, yakni satu bulan setelah invasi dimulai, dengan lebih dari 7.100 korban tercatat hanya dalam satu bulan. Angka tersebut secara perlahan menurun, tetapi tidak pernah berhenti total, menandakan bahwa kekerasan terhadap warga sipil terus berlanjut meskipun intensitas konflik berubah. Pada kuartal kedua

2023, jumlah korban bulanan masih berada di atas 500 kasus, menunjukkan bahwa bahkan setelah lebih dari satu tahun invasi, pelanggaran HAM tetap tinggi. Sebaran korban dalam infografis ini juga menunjukkan bahwa fase awal invasi adalah periode paling mematikan, ditandai dengan penggunaan senjata berat terhadap daerah permukiman sipil di Kyiv, Mariupol, dan Kharkiv.

Gambar 2.2 Korban Sipil Terverifikasi (24 Februari 2022 – 12 Maret 2023)

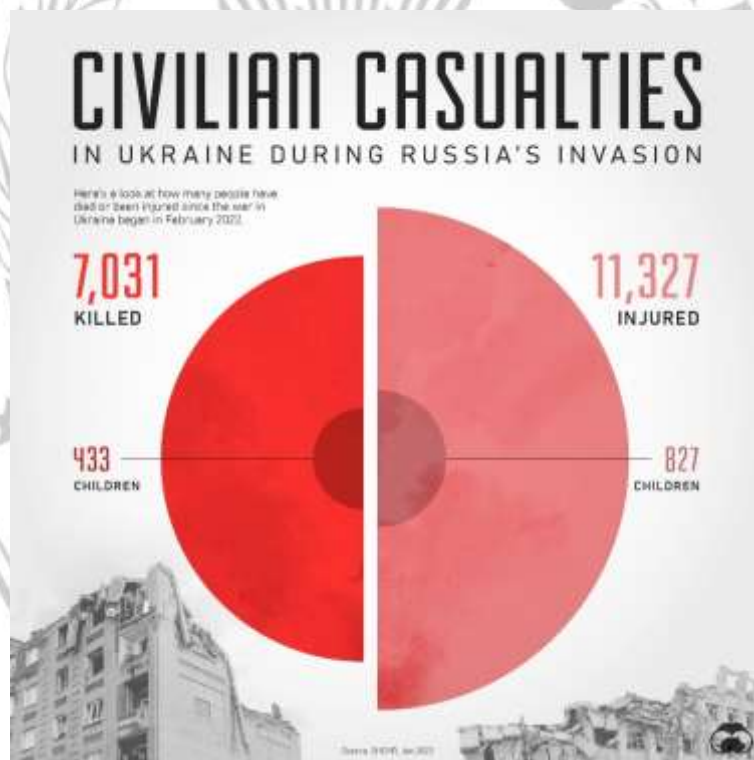


(Sumber: OHCHR – *Verified Civilian Casualties Graphic*, Maret 2023)

Gambar tersebut berisi data terverifikasi yang mencatat jumlah korban sipil hingga 12 Maret 2023, dengan total 21.965 korban, yang terdiri atas 8.231 orang tewas dan 13.978 orang luka-luka. Pemetaan korban berdasarkan wilayah geografis menunjukkan bahwa wilayah yang tetap berada di bawah kendali pemerintah Ukraina justru mencatatkan jumlah

korban lebih tinggi, mencapai lebih dari 84% dari keseluruhan korban, dibandingkan wilayah yang dikuasai pasukan pendudukan Rusia. Hal ini menandakan bahwa serangan sering kali diarahkan ke area yang secara administratif berada di luar zona konflik aktif, melibatkan sasaran seperti infrastruktur sipil dan perumahan padat penduduk. Dalam hukum humaniter internasional, serangan semacam ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip pembedaan antara kombatan dan non-kombatan.

Gambar 2.3 Jumlah Korban Sipil di Ukraina Selama Invasi Rusia
(Februari 2022 – Januari 2023)



Sumber: OHCHR, “Civilian Casualties in Ukraine During Russia’s Invasion,” Januari 2023

Gambar tersebut menunjukkan data tentang jumlah korban sipil di Ukraina sejak dimulainya invasi Rusia pada Februari 2022 hingga Januari 2023. Total korban yang tercatat sebanyak 18.358 orang, terdiri dari 7.031 korban tewas dan 11.327 korban luka-luka. Dari jumlah tersebut, terdapat 433 anak-anak yang meninggal dunia dan 827 anak-anak yang mengalami luka-luka. Proporsi anak-anak dalam keseluruhan korban menunjukkan bahwa kelompok usia rentan turut menjadi sasaran dalam peperangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam gambar tersebut menampilkan pembagian korban melalui diagram lingkaran terbelah dua. Bagian kiri menunjukkan jumlah korban tewas (dalam merah tua), sedangkan bagian kanan menunjukkan jumlah korban luka-luka (dalam merah muda). Visual ini menegaskan bahwa jumlah korban luka hampir dua kali lebih banyak dibandingkan korban tewas.

HRMMU mendapatkan laporan terkait kasus kekerasan yang didapat oleh tahanan perang dan warga sipil saat ditangkap oleh militer Rusia. Para korban ini kerap mendapat tindakan kekerasan seperti pemukulan dan tendangan, penggunaan alat kejut listrik, kekerasan seksual, dan banyak kegiatan penyiksaan lain. Efek dari tindakan tersebut, setidaknya ada satu korban tewas dan banyak korban yang mendapat luka serius atas tindakan tersebut. Adanya laporan terkait tindakan kekerasan seksual yang kerap terjadi di beberapa wilayah utamanya di wilayah Kharkiv dan Kherson.

Sejak 24 februari 2022, tercatat ada 86 kejadian kekerasan seksual terhadap pria maupun wanita dari usia remaja hingga usia dewasa.⁴⁸ Tindakan kekerasan seksual yang dialami para korban diantaranya adalah tindakan pemerkosaan, pemerkosaan massal, penelanjangan paksa, pelecehan seksual di tempat umum, dan penyiksaan seksual. Tindakan yang dilakukan oleh pihak militer terhadap masyarakat sipil ini dapat menimbulkan trauma dan masalah mental yang sangat serius. Terlebih kejahatan ini tidak dilakukan sekali duakali, namun dilakukan hampir setiap saat sehingga para korban mengalami trauma yang cukup mendalam.

Dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, pelanggaran hak asasi manusia seringkali menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap penduduk sipil terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Salah satu aspek yang paling mencolok dari pelanggaran HAM ini adalah kekerasan fisik yang menyebabkan korban luka maupun meninggal dunia akibat berbagai bentuk serangan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jenis-jenis kekerasan beserta jumlah korban luka dan meninggal yang tercatat sepanjang periode Februari 2022 hingga Desember 2023.

⁴⁸ *Pasukan Ukraina Siap Mengamuk di Kherson, Rusia Ungsikan Warganya.* (n.d.). Retrieved November 21, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221020102910-134-863057/pasukan-ukraina-siap-mengamuk-di-kherson-rusia-ungsikan-warganya>

Tabel 2.1 *Jenis Kekerasan dan Jumlah Korban*

No.	Jenis Kekerasan	Periode	Jumlah Korban	
			Luka	Meninggal
1.	Senjata peledak dengan efek area luas (artileri, roket, rudal, serangan udara)	Februari 2022 – Juni 2023	15.131	9.177
2.	Ranjau dan sisa bahan peledak perang (ERW)	Februari 2022 – Juni 2023	612	293
3.	Kekerasan terhadap anak-anak	Februari 2022 – Juni 2023	1.095	535
4.	Kekerasan lainnya (termasuk penembakan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan)	Februari 2022 – Desember 2023	687	56
Total			17.525	10.061

Sumber : *Laporan OHCHR, 2023*

Data dalam Tabel 2.1 mengenai jenis kekerasan dan jumlah korban dalam konflik Rusia-Ukraina berasal dari laporan resmi Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR). Laporan yang di lampirkan mencatat bahwa dari 24 Februari 2022 hingga 30 Juni 2023, terdapat 25.170 korban sipil di Ukraina, termasuk 9.177 orang tewas dan 15.993 orang terluka. Sebagian besar korban tersebut diakibatkan oleh pemakaian senjata peledak dengan efek area luas seperti artileri, roket, rudal, dan serangan udara. Selain itu, OHCHR juga mendokumentasikan korban akibat ranjau dan sisa bahan peledak perang (ERW), serta kekerasan terhadap anak-anak. Data ini diperoleh melalui berbagai metode, termasuk wawancara dengan korban dan saksi, analisis materi pendukung, serta laporan dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Laporan OHCHR cenderung bersifat konservatif dan kemungkinan belum sepenuhnya mencerminkan jumlah korban sebenarnya di lapangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses ke wilayah-wilayah yang terdampak berat, seperti Mariupol, Severodonetsk, dan sebagian besar wilayah Donetsk dan Luhansk yang dikuasai Rusia, di mana verifikasi independen sulit dilakukan. Selain itu, keterlambatan pelaporan, kendala keamanan, dan tekanan terhadap saksi maupun lembaga lokal turut memengaruhi kelengkapan data. Meskipun laporan OHCHR menjadi salah satu sumber paling kredibel dan sistematis yang tersedia, para peneliti dan aktor internasional tetap mengakui bahwa angka korban sipil kemungkinan jauh lebih tinggi daripada yang berhasil didokumentasikan secara resmi.

